

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

1.1 Identitas Narasumber

Narasumber yang dapat dikategorikan sebagai pelaku UMKM diperoleh berdasarkan data yang terdaftar sebagai UMKM yang menerima bantuan dana Covid-19. Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan sejak bulan november 2021 kemarin. Memperoleh hasil yaitu, 60 narasumber yang telah dilakukan wawancara meliputi UMKM dagang, kuliner dan jasa. UMKM bidang dagang memiliki jumlah 20, UMKM bidang kuliner memiliki jumlah 30 dan UMKM bidang jasa memiliki jumlah 10. Narasumber yang berjumlah 60 tersebut bertempat tinggal dilingkup daerah Kabupaten Jombang. Batasan penelitian yang telah ditetapkan pada bab 3 sebelumnya menunjukkan bahwa subyek penelitian harus merupakan UMKM bidang dagang dan kuliner. Reduksi data dilakukan untuk membuang data yang tidak perlu yaitu data mengenai UMKM bidang jasa yang berjumlah 10 tersebut. Kemudian melakukan pengelompokan data sehingga

memperoleh data yang sesuai dengan penulis harapkan. Data yang diperoleh selanjutnya akan disajikan berupa tabel dan diberi uraian singkat berisikan penjelasan mengenai arti dari angka-angka yang terdapat dalam tabel tersebut.

A. Bidang Usaha

Bidang usaha yang telah ditetapkan pada batasan penelitian terdiri dari 2 bidang usaha yaitu bidang dagang dan bidang kuliner. Bidang kuliner meliputi makanan berat (nasi kuning, nasi pecel, nasi jagung, nasi bebek dan nasi campur), makanan ringan (kue tart, cookies, *dessert box*, kripik tempe, seblak, pempek, siomay, makaroni pedas, gorengan dan roti panggang), minuman (kopi kekinian, es buah, es permen karet dan sebagainya). Bidang dagang meliputi penjualan barang kebutuhan harian, buku parenting untuk balita, peralatan penunjang pernikahan seperti (soflens, kuku palsu dan kuteks atau henna), *skincare*, sling bag, parfum, baju muslim, baju anak-anak, pakan ternak, jam tangan dan buket bunga atau makanan.

Tabel 4.1
Bidang Usaha
Dilihat dari bidang usaha

No	Bidang usaha	Jumlah	(%)
1	Bidang dagang	30	60%
2	Bidang kuliner	20	20%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang didominasi oleh bidang kuliner dengan jumlah 20 atau 40% sedangkan bidang

dagang jumlahnya 30 atau 60%. Berdasarkan hasil wawancara lapangan didapatkan bahwa pelaku UMKM bidang dagang sekitar 12 orang telah melakukan proses akuntansi mulai dari jurnal sederhana berupa transaksi yang terjadi pada hari itu hingga laporan laba rugi usaha sedangkan pelaku UMKM bidang kuliner sekitar 9 orang.

B. Usia Pemilik

Usia pemilik merupakan faktor utama untuk mengetahui UMKM di Kabupaten Jombang didominasi oleh kalangan muda atau tua. Berdasarkan kedua kalangan tersebut juga untuk mengetahui bagaimana mereka menerapkan akuntansi yang telah ditetapkan pada SAK EMKM.

Tabel 4.2
Usia Pemilik
Dilihat dari usia pemilik usaha

No	Umur	Jumlah	(%)
1	21-30 tahun	26	52%
2	31-40 tahun	14	28%
3	41-50 tahun	6	12%
4	>51 tahun	4	8%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara lapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang didominasi oleh anak muda dengan usia antara 21-30 tahun memiliki jumlah 26 atau 52% dengan, lalu diikuti narasumber memiliki usia 31-40 tahun dengan jumlah 14 atau 28% dan narasumber dengan usia 41-50 tahun memiliki jumlah 6 atau 12% dan terakhir yaitu narasumber usia >51 tahun (54,55,56 dan 64

tahun) memiliki jumlah 4 atau 8%. Pelaku UMKM berusia 21-30 tahun sebanyak 12 orang telah menyusun laporan keuangan berupa laba rugi usaha meskipun belum sepenuhnya benar atau sesuai dengan SAK EMKM.

C. Pendidikan Pemilik UMKM

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM tersebut memahami proses akuntansi serta penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM dalam usahanya.

Tabel 4.3
Pendidikan Pemilik UMKM
Dilihat dari pendidikan pemilik UMKM

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Tamat SD	-	-
2	Tamat SMP	4	8%
3	Tamat SMA	28	56%
4	Tamat Diploma	6	12%
5	Tamat Sarjana	12	24%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang kebanyakan menyelesaikan pendidikan tingkat SMA dengan jumlah 28 atau 56%, diikuti tamatan Sarjana dengan jumlah 12 atau 24% dan tamatan diploma dengan jumlah 6 atau 12% dan terakhir tamatan SMP dengan jumlah 4 atau 8%. Pemilik UMKM tamatan SMA sebanyak 9 orang telah menerapkan proses akuntansi yaitu jurnal transaksi harian hingga laporan laba rugi. Meskipun,

belum semua pelaku UMKM menerapkan sesuai dengan ketentuan pada SAK EMKM.

D. Lama Usaha

Lama usaha dari sebuah UMKM dapat menunjukkan pengalaman mereka selama ini. Mulai dari pengalaman berniaga maupun kemahiran membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Tabel 4.4
Lama Usaha
Dilihat dari lama usaha

No.	Lama usaha (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	2-5 Tahun	39	78%
2	6-10 Tahun	8	16%
3	11-15 Tahun	-	-
4	>16 Tahun	3	6%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang memiliki lama usaha paling banyak yaitu antara 2-5 tahun dengan jumlah 39 atau 78% dimana pemilik UMKM mengaku memulai usahanya sekitar 2017-2018. Lalu diikuti lama usaha antara 6-10 tahun dengan jumlah 8 atau 16% dan terakhir lama usaha >16 tahun dengan jumlah 3 atau 6%. UMKM dengan usia 2-5 tahun memiliki 17 orang yang telah menerapkan proses akuntansi mulai dari jurnal transaksi harian hingga laporan laba rugi usaha sedangkan UMKM dengan usia 6-10 tahun dan >16 tahun terdapat 2 orang.

E. Modal Awal

Modal awal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pada awal seseorang memulai sebuah usaha yang sifatnya jangka panjang. Kriteria modal awal bagi UMKM yaitu :

1. Usaha Mikro modal awal mulai dari 500 ribu hingga 1 miliar
2. Usaha Kecil modal awal mulai 1 miliar hingga 5 miliar
3. Usaha Makro modal awal mulai 5 miliar hingga 10 miliar.

Tabel 4.5
Modal Awal
Dilihat dari modal awal usaha

No.	Modal Awal Usaha	Jumlah	(%)
1	500 ribu -1 miliar	50	100%
2	1 miliar – 5 miliar	-	-
3	5 miliar – 10 miliar	-	-
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang sebanyak 50 narasumber atau 100% merupakan usaha mikro dilihat dari modal awal usaha yaitu antara 500 ribu-1 miliar. Menurut para pemilik UMKM modal awal yang digunakan kurang dari 10 juta rupiah.

F. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan merupakan salah kriteria dalam menentukan jenis usaha tersebut masuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berikut adalah kriteria jumlah karyawan bagi UMKM yaitu :

1. Usaha mikro memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang

2. Usaha kecil memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang
3. Usaha menengah memiliki jumlah karyawan maksimal 300 orang.

Tabel 4.6
Jumlah Karyawan
Dilihat dari jumlah karyawan

No	Jumlah karyawan	Jumlah	(%)
1	1-5 orang	44	88%
2	6-10 orang	4	8%
3	> 10 orang	-	-
Jumlah		48	96%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang paling banyak memiliki karyawan 1-5 orang dengan jumlah 44 atau 88%, diikuti dengan karyawan 6-10 orang dengan jumlah 4 atau 8% sedangkan terdapat 2 orang pelaku UMKM yang tidak memiliki karyawan sama sekali atau bisa dikatakan handle usahanya sendiri secara penuh. Berdasarkan jumlah tersebut dapat ditentukan bahwa 48 pelaku UMKM tersebut masuk kedalam jenis usaha mikro karena memiliki karyawan yang kurang dari 10 orang.

G. Pemegang Keuangan

Pemegang keuangan merupakan pusat yang memegang kendali seluruh transaksi keuangan dalam menjalankan suatu usaha. Tanggung jawabnya terhadap seluruh catatan keuangan suatu usaha ataupun hanya sebatas mencatat penjualan kepada pelanggan saja.

Tabel 4.7
Pemegang Keuangan
Dilihat dari pemegang keuangan

No.	Pemegang Keuangan Usaha	Jumlah	(%)
1	Kasir	1	2%
2	Pemilik	49	98%
Jumlah		50	100 %

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang sebanyak 49 narasumber atau 98% tidak menggunakan tenaga kasir sedangkan 1 narasumber atau 2% menggunakan tenaga kasir. Pelaku UMKM mengaku menggunakan tenaga kasir untuk membantu dalam melakukan pencatatan penjualan kepada pelanggan.

H. Status Tempat Usaha

Tempat usaha merupakan faktor utama dalam keberhasilan sebuah usaha. Jika tempat usaha tersebut strategis maka akan mudah dijangkau oleh pelanggan. Tempat usaha tersebut ada 2 macamnya yaitu tempat usaha milik sendiri dan sewa. Tempat usaha milik sendiri ini kebanyakan merupakan rumah atau tempat tinggal dari pelaku UMKM tersebut. Sedangkan tempat usaha sewa memang sengaja dipilih sebagian pelaku UMKM dengan memilih lokasi yang strategis untuk menarik pelanggan.

Tabel 4.8
Status Tempat Usaha

Dilihat dari status tempat usaha

No.	Status Tempat Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Sewa	5	10%
2	Milik Sendiri	45	90%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang sebanyak 45 narasumber atau 90% telah memiliki tempat usaha mereka sendiri. Kebanyakan pemilik UMKM membuka usaha dirumah mereka sendiri sedangkan 5 narasumber atau sekitar 10% lainnya menyewa tempat untuk usaha mereka.

I. Pelatihan Pembukuan Akuntansi

Pelatihan pembukuan akuntansi diadakan untuk membantu pelaku UMKM agar laporan keuangan mereka tertata sehingga dapat mengajukan pinjaman kepada bank.

Tabel 4.9
Pelatihan Pembukuan

Respon mengenai pelatihan pembukuan

No.	Pernah / Tidak Mendapat Pelatihan	Jumlah	(%)
1	Pernah Mendapat Pelatihan	5	10%
2	Tidak Pernah Mendapat Pelatihan	45	90%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang terdapat 45 narasumber belum atau tidak pernah memperoleh pelatihan dalam membuat laporan keuangan sedangkan 5 narasumber diantaranya pernah atau sudah mengikuti pelatihan membuat laporan keuangan. Dari 5 narasumber tersebut 4 diantaranya merupakan tamatan SMA sedangkan 1 narasumber lainnya merupakan tamatan Diploma. Sejumlah 4 narasumber tamatan SMA tersebut 3 diantaranya berusia 21-30 tahun dan 1 lainnya berusia >51 tahun. Untuk 1 narasumber tamatan Diploma berusia 21-30 tahun. Berdasarkan 5 narasumber tersebut diketahui bahwa pelaku UMKM yang telah memperoleh pelatihan pembukuan akuntansi didominasi oleh pelaku UMKM dengan rentang usia 21-30 tahun dengan pendidikan tamatan SMA. Penerapan Akuntansi berdasarkan SAK EMKM

A. Asumsi dasar

Berdasarkan SAK EMKM terdapat tiga asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yaitu (SAK EMKM, 2018:5-6) :

1. Dasar AkruaI (entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akruaI. Akun aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban akan diakui terjadinya transaksi tersebut tanpa menunggu adanya kas masuk maupun kas keluar)
2. Kelangsungan Usaha (sebagai pemilik UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan pada SAK EMKM untuk menilai atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan)

3. Konsep Entitas Bisnis (transaksi yang berkaitan dengan bisnis pelaporan keuangannya harus dipisahkan dari transaksi lainnya sekalipun transaksi dari pemilik).

Tabel 4.10
Asumsi Dasar
Asumsi dasar

No	Asumsi Dasar	Jumlah
1	Mencatat transaksi saat terjadinya transaksi tersebut	22
2	Menjalankan usaha sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	26
3	Memisahkan keuangan pemilik dengan keuangan usaha	5

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Sejumlah 22 (44%) narasumber sudah menerapkan dasar akrual dengan mengakui terjadinya transaksi saat itu juga, contohnya saat mencatat transaksi pembelian. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 16 narasumber sudah menjalankan usahanya 2-5 tahun, 10 narasumber memiliki latar belakang pendidikan tamatan SMA, dan 9 narasumber memiliki usia antara 21-30 tahun. Adapun 28 narasumber (56%) mengaku tidak menerapkan asumsi dasar berdasarkan SAK EMKM yaitu dasar akrual. Hal tersebut terjadi karena UMKM yang dijalankan hanya dihandle oleh 1 orang saja dan mayoritas belum mendapatkan pelatihan akuntansi.

2. Sejumlah 26 (52%) narasumber sudah menerapkan asumsi dasar yaitu kelangsungan usaha dengan menjalankan usaha tanpa batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 21 narasumber sudah menjalankan usahanya 2-5 tahun, 18 narasumber memiliki latar belakang pendidikan tamatan SMA dan 14 narasumber memiliki usia antara 21-30 tahun. Adapun 24 narasumber (48%) belum atau tidak menerapkan asumsi dasar berdasarkan SAK EMKM yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Hal tersebut terjadi karena banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman mengenai akuntansi.
3. Sejumlah 5 (10%) narasumber sudah menerapkan asumsi dasar terkait konsep entitas bisnis dengan melakukan pemisahan keuangan antara milik pribadi dengan milik usaha. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 4 narasumber sudah menjalankan usahanya 2-5 tahun, 3 narasumber memiliki latar belakang pendidikan tamatan SMA dan 4 narasumber memiliki usia antara 21-30 tahun dan narasumber berusia 41-50 tahun. Adapun 45 narasumber (90%) tidak atau belum menerapkan asumsi dasar berdasarkan SAK EMKM yang ketiga yaitu konsep entitas bisnis. Hal tersebut terjadi karena pelaku UMKM banyak yang belum memperoleh pelatihan mengenai akuntansi.

1.2 Proses Akuntansi

Proses akuntansi terdiri atas buku harian (berisikan informasi transaksi per hari dengan gaya bahasa yang mudah dipahami), buku jurnal (berisikan informasi transaksi selama periode harian atau mingguan yang disajikan secara urut sesuai waktu terjadinya transaksi), buku besar (berisikan informasi detail mengenai setiap akun transaksi, jenis persediaan barang dan detail pelanggan), laporan keuangan (berisikan informasi posisi keuangan dan laba rugi usaha. Manfaat akuntansi berdasarkan data diatas, pelaku UMKM seharusnya sadar betapa pentingnya akuntansi bagi kegiatan usahanya. Kegunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan bagi setiap UMKM terutama pada keuangannya (Eliada et al., 2017:12).

A. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan para pelaku UMKM di Kabupaten Jombang berupa jurnal. Dalam jurnal tersebut pencatatannya jika terjadi penjualan maka dianggap sebagai penerimaan kas, jika terjadi pembelian, pembayaran gaji karyawan, biaya listrik dan uang sewa akan dianggap sebagai pengeluaran kas.

Tabel 4.11

Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Penerimaan dan pengeluaran kas

No.	Mencatat penerimaan dan pengeluaran Kas	Jumlah	(%)
1	Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas	21	42%
2	Tidak Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas	29	58%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang terdapat 21 narasumber atau 42% melakukan pencatatan saat penerimaan dan pengeluaran kas hanya sebatas penjualan hari ini, gaji karyawan, biaya listrik dan uang sewa. Sedangkan 29 narasumber atau 58% lainnya tidak melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM tidak pernah mencatat omzet yang didapatkan. Pelaku UMKM mengaku bahwa setiap omzet yang diterima akan langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian lainnya sehingga tidak mampu memperkirakan omzet yang didapat dalam kurun waktu satu bulan bahkan satu tahun. Kerugian yang dialami pelaku UMKM jika tidak memperhitungkan omzet yaitu kesulitan dalam memperhitungkan pajak karena tidak dapat dilihat apakah usaha tersebut mengalami untung atau rugi. Akibatnya kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM hanya sebatas norma saja dan tidak memperhitungkan jumlah pajak yang dibayarkan.

B. Mencatat piutang

Pencatatan piutang dilakukan saat terjadi penjualan secara kredit oleh para konsumen. Pelaku UMKM biasanya mencatat dalam satu buku khusus dengan hanya berisikan nama konsumen dan jumlah piutang.

Tabel 4.12
Piutang
Buku piutang

No	Buku Pencatatan Piutang	Jumlah	(%)
1	Mencatat Piutang	45	90%
2	Tdak Mencatat Piutang	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang terdapat 45 narasumber atau 90% mencatat setiap piutang yang terjadi saat penjualan tujuannya agar mudah melakukan penagihan kepada pelanggannya. Hal tersebut didukung dengan adanya buku atas piutang yang dimiliki 45 pelaku UMKM meskipun pencatatannya sederhana. Sedangkan 5 narasumber atau 10% diantaranya tidak mencatat piutang dikarenakan mereka hanya menerapkan transaksi secara cash atau tunai.

C. Mencatat hutang

Pencatatan hutang dilakukan atau terjadi saat pelaku UMKM memerlukan pinjaman dari bank ataupun saat melakukan pembelian secara kredit.

Tabel 4.13
Hutang
Buku hutang

No.	Respon	Jumlah	(%)
1	Mencatat Hutang	47	94%
2	Tidak Mencatat Hutang	3	6%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang terdapat 47 narasumber atau 94% melakukan pencatatan hutang untuk mengetahui kapan harus dilakukan pelunasan agar tidak dikenai denda. Hal tersebut didukung dengan adanya buku hutang yang dimiliki pelaku UMKM meskipun berupa pencatatan sederhana. Sedangkan 3 narasumber atau 6% diantaranya tidak mencatat hutang karena belum pernah melakukan pinjaman ke bank.

D. Mencatat persediaan

Pencatatan persediaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM bentuknya sangat sederhana. Misalnya tertulis barang A sejumlah 10, pencatatan tersebut hanya dilakukan saat *restock* barang saja sehingga tidak mengetahui jumlahnya saat barang tersebut sudah terjual maupun jumlahnya berkurang.

Tabel 4.14
Persediaan
Persediaan

No.	Respon	Jumlah	(%)
1	Mencatat Persediaan	26	52%

2	Tidak Mencatat Persediaan	24	48%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang terdapat 26 narasumber atau 52% mencatat persediaannya untuk mengetahui barang apa saja yang telah habis sehingga saat melakukan *restock* barang sesuai target tidak kelebihan atau bahkan kekurangan. Hal tersebut didukung dengan adanya buku yang mencatat persediaan namun hanya dituliskan jumlah barang yang perlu dibeli dan jumlah tersebut kebanyakan berdasarkan *request* customer. Sedangkan 24 narasumber atau 48% lainnya tidak mencatat persediaan karena mereka akan melakukan *restock* barang saat barang tersebut terlihat habis atau kosong dan jumlahnya tidak diberi target.

E. Mencatat pendapatan dan penjualan

Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diperoleh pelaku UMKM sebagai hasil dari kegiatan penjualan yang dilakukan pada periode tertentu. Pencatatan pendapatan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah transaksi penjualan yang terjadi dalam periode waktu tertentu.

Tabel 4.15
Pendapatan dan Penjualan
Pendapatan dan penjualan

No.	Pencatatan Pendapatan	Jumlah	(%)
1	Mencatat pendapatan	25	50%
2	Tidak mencatat pendapatan	25	50%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang terdapat 25 narasumber (50%) melakukan pencatatan mengenai pendapatan yang diterima. Jumlah pelaku UMKM yang melakukan pencatatan pendapatan ini sama dengan jumlah pelaku UMKM yang melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan penjualan barang yang laku per hari dalam bentuk rupiah dan jumlah barangnya. Pencatatan hari ini hari sebelumnya dan hari berikutnya tidak dilakukan secara terpisah sehingga menyebabkan informasi keuangannya menjadi tidak valid. Sedangkan 25 narasumber (50%) lainnya tidak melakukan pencatatan hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diterima akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

F. Mencatat biaya-biaya

Pencatatan atau perhitungan biaya-biaya dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah yang harus dikurangkan dari pendapatan agar pelaku UMKM mengetahui laba bersih yang diterimanya. Meskipun pelaku UMKM tersebut tidak melakukan pencatatan pendapatan tetapi mereka tetap mencatat dan memperhitungkan mengenai pengeluaran biaya.

Tabel 4.16
Mencatat Biaya
Biaya-biaya

No	Biaya-Biaya Dalam Perhitungan Laba Rugi	Ya	(%)	Tidak	%
1	Sewa Toko	5	10%	45	90%

2	Uang Makan Karyawan	3	6%	47	94%
3	Biaya Listrik	50	100%	-	-
4	Gaji Karyawan	48	96%	2	4%
5	Uang kebersihan	5	10%	45	90%
6	Biaya pengemasan	15	30%	35	70%
7	Uang Bensin	17	34%	33	66%
8	Belanja Rumah Tangga	23	46%	27	54%
9	Menabung	45	90%	15	10%
10	Uang Keamanan	5	10%	45	90%
11	Service Kendaraan	5	10%	45	90%
12	Pengambilan Pribadi	50	100%	-	-
13	Beban Penyusutan	0	0%	50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

- 1) Sewa toko, sebanyak 45 narasumber (90%) tidak mengeluarkan sejumlah biaya tersebut karena tempat usaha yang mereka gunakan merupakan milik pribadi
- 2) Uang makan karyawan, sebanyak 45 narasumber (90%) tidak mengeluarkan sejumlah uang dikarenakan uang makan karyawan sudah dijadikan satu berupa gaji karyawan. Sedangkan 2 narasumber (4%) lainnya tidak memiliki karyawan sehingga tidak menghitung pengeluaran tersebut
- 3) Biaya listrik, sebanyak 50 narasumber (100%)
- 4) Gaji karyawan, sebanyak 2 narasumber (4%) tidak melakukan perhitungan pengeluaran untuk gaji karyawan karena tidak memiliki karyawan

- 5) Uang kebersihan, sebanyak 45 narasumber (90%) tidak melakukan perhitungan pengeluaran untuk uang kebersihan karena tempat usaha mereka milik pribadi bukan berupa sewa
- 6) Biaya pengemasan, sebanyak 35 narasumber (70%) tidak melakukan perhitungan mengenai biaya pengemasan ini didominasi oleh pelaku UMKM bidang dagang
- 7) Uang bensin, sebanyak 33 narasumber (66%) tidak melakukan perhitungan mengenai pengeluaran bensin karena tidak menerapkan sistem pesan antar.
- 8) Belanja rumah tangga, sebanyak 27 narasumber (54%) tidak melakukan perhitungan belanja rumah tangga karena telah menerapkan prinsip entitas bisnis sehingga memisahkan antara belanja kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan usaha.
- 9) Menabung, sebanyak 5 narasumber (10%) tidak memperhitungkan uang untuk menabung karena masih harus membayarkan uang sewa untuk tempat usahanya.
- 10) Uang keamanan, sebanyak 45 narasumber (90%) tidak melakukan perhitungan uang keamanan karena mereka menjalankan usaha pada tempat milik pribadi atau rumah.
- 11) Servis kendaraan, sebanyak 45 narasumber (90%) tidak melakukan perhitungan mengenai service kendaraan karena disatu sisi tidak melakukan sistem pesan antar juga tidak memiliki kendaraan yang diperuntukan untuk melakukan pengangkutan barang.

- 12) Pengambilan pribadi, 50 narasumber (100%) melakukan perhitungan mengenai pengambilan pribadi.
- 13) Beban penyusutan, sebanyak 50 narasumber (100%) tidak melakukan perhitungan mengenai beban penyusutan karena belum atau tidak mengerti bagaimana sistem akuntansinya.

Dari informasi diatas dapat diketahui bahwa pemilik UMKM di Kabupaten Jombang dalam membuat pelaporan laba rugi belum tepat atau belum sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Karena masih memasukkan biaya rumah tangga, maka mengakibatkan pelaporan laba rugi yang sudah dibuat tidak tepat. Dalam memasukkan penyusunan laba rugi, pemilik UMKM di Kabupaten Jombang hanya menyusun pelaporan laba rugi berdasarkan pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya sewa toko, biaya uang makan karyawan, biaya listrik, biaya gaji karyawan, biaya kebersihan, biaya pengemasan, biaya bensin, biaya keamanan, dan biaya pengambilan pribadi.

G. Periode pencatatan laba rugi

Periode pencatatan laba rugi merupakan langkah pertama dalam menyiapkan laporan laba rugi. Periode pencatatan laba rugi disesuaikan dengan kemampuan pelaku UMKM tersebut dari sisi pengetahuan serta ketersediaan waktu.

Tabel 4.17
Laba Rugi
Periode pencatatan laba rugi

No.	Periode Perhitungan Laba Rugi	Jumlah	(%)
1	Periode satu hari sekali	6	12%
2	Periode satu minggu sekali	4	8%
3	Periode satu bulan sekali	11	22%
4	Periode enam bulan sekali	-	-
5	Periode satu tahun sekali	-	-
Jumlah		21	42%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang sebanyak 21 narasumber (42%) jumlah ini sama dengan jumlah pelaku UMKM yang melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas serta pendapatan. Pencatatan laba rugi satu bulan sekali sebanyak 11 narasumber atau 22%, pencatatan laba rugi satu hari sekali sebanyak 6 narasumber atau 12%, pencatatan laba rugi satu minggu sekali sebanyak 4 narasumber atau 8%, hal tersebut didukung adanya laporan laba rugi yang dibuat pelaku UMKM dalam bentuk buku namun pencatatannya belum sesuai dengan SAK EMKM.

H. Kegunaan laporan laba rugi

Unsur-unsur laporan laba rugi terdiri atas penghasilan atau pendapatan berisikan informasi mengenai pemasukan kas yang mempengaruhi kenaikan aset, penurunan liabilitas dan kenaikan ekuitas entitas yang bukan berasal dari kontribusi penanam modal. Beban atau biaya berisikan informasi mengenai pengeluaran kas yang mempengaruhi penurunan aset, kenaikan liabilitas dan

penurunan ekuitas yang bukan disebabkan oleh distribusi pada penanam modal.

Tabel 4.18
Kegunaan Laba Rugi
Kegunaan laporan laba rugi

No.	Pencatatan Pendapatan	Jumlah	(%)
1	Tidak sebagai pedoman mengukur keberhasilan usaha	29	58%
2	Sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan usaha	21	42%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang sebanyak 21 narasumber atau 42% menganggap bahwa pencatatan laba rugi dapat dijadikan pedoman untuk mengukur keberhasilan usahanya. Hal tersebut didukung dengan pelaku UMKM telah membuat laporan laba rugi dilihat dari data periode pencatatan laba rugi. Sedangkan 29 narasumber atau 58% tidak menganggap laba rugi sebagai pengukur kemajuan usahanya.

I. Perhitungan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan mencakup pos-pos antara lain, aset lancar (kas dan setara kas, piutang dan persediaan), aset tetap, liabilitas (utang usaha dan utang bank) dan ekuitas (SAK EMKM, 2018:4).

Tabel 4.19
Posisi Keuangan
Posisi keuangan

No.	Pencatatan posisi keuangan	Jumlah	(%)
1	Mencatat posisi keuangan	-	-
2	Tidak mencatat posisi keuangan	50	100%
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang sebanyak 50 narasumber atau 100% tidak melakukan pencatatan laporan posisi keuangan hal tersebut dikarenakan pemilik usaha minim pengetahuan serta mengalami kesusahan dalam mengelompokkan aset, liabilitas dan ekuitas. Hal tersebut didukung dengan mayoritas narasumber belum mendapatkan pelatihan akuntansi, dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA dan mengelola kegiatan usahanya sendiri.

J. Kegunaan laporan posisi keuangan

Kegunaan laporan posisi keuangan adalah untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki, bagaimana kondisi liabilitasnya dan modal pada UMKM tersebut dalam periode tertentu.

Tabel 4.20
Kegunaan Posisi Keuangan
Kegunaan laporan posisi keuangan

No.	Pencatatan Pendapatan	Jumlah	(%)
1	Tidak sebagaipedoman mengukur kinerja usaha	50	100%

2	Sebagai pedoman untuk mengukur kinerja usaha	-	-
Jumlah		50	100%

Sumber : hasil wawancara dilapangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan UMKM di Kabupaten Jombang sebanyak 50 narasumber atau 100% tidak menjadikan laporan posisi keuangan sebagai pedoman mengukur sejauh mana kinerja usaha mereka selama ini. Pelaku UMKM masih kesusahan dalam mengelompokkan aset, liabilitas dan ekuitas dan belum dapat menghasilkan laporan keuangan sehingga belum mampu mengukur kinerja usahanya.

K. Kendala dalam menyusun laporan keuangan

Beberapa kendala yang dialami oleh pemilik UMKM saat membuat laporan keuangan terutama laporan laba rugi usaha diantaranya yaitu :

1. Hanya *dihandle* oleh satu orang saja
2. Sulit membagi waktu
3. Ketika harga bahan-bahan yang digunakan dalam usaha naik
4. Terkadang pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang hal tersebut dikarenakan pengeluaran tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha saja tetapi juga kegiatan rumah tangga lainnya
5. Sulit memisahkan uang usaha dengan uang pribadi.

PENARIKAN KESIMPULAN DAN VERIFIKASI

Berdasarkan penyajian data diatas persepsi pelaku UMKM atas penerapan akuntansi SAK EMKM terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Jombang dengan narasumber 50 orang apabila dilihat berdasarkan

- a. **Asumsi dasar**, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum atau tidak mengetahui secara tepat dan sesuai SAK EMKM untuk laporan keuangannya. Hal ini terungkap dengan penyampaian yang menunjukkan bahwa belum semuanya menerapkan asumsi dasar berdasarkan SAK EMKM. Pencatatan berbasis entitas bisnis 90% tidak dilakukan, mayoritas pencatatan yang dilakukan tidak dipisahkan antara aktivitas keuangan usaha dan keuangan pribadi. Walaupun tidak memahami akrual basis, namun dalam prakteknya mayoritas pelaku UMKM memiliki catatan piutang dan utang. Hal ini lebih mengutamakan supaya pelaku UMKM tidak lupa karena dalam pelaksanaan uang tersebut belum diterima dan belum dibayar. Pemahaman bahwa usaha didirikan untuk keberlanjutan dengan menjalankan usaha sampai waktu yang tidak bisa ditentukan belum sepenuhnya dimengerti oleh pelaku UMKM. Sebagian besar lebih berupaya bagaimana usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
- b. **Proses akuntansi**, sebagian sudah melakukan sesuai kebutuhannya, seperti pencatatan atas piutang, pencatatan utang, pencatatan persediaan, pencatatan penerimaan pengeluaran, pencatatan biaya, pencatatan laba rugi dan pencatatan posisi keuangan atau mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kebutuhan pencatatan memiliki fungsi supaya pelaku UMKM tidak lupa, untuk mengetahui kewajiban yang harus dilakukan baik untuk membayar utang, mendapatkan kas dari pelanggan yang menunda pembayaran, kapan melakukan pembelian lagi atas barang dagangan atau persediaannya. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas lebih dari 50% tidak dilakukan.

Hal ini karena uang sudah diterima dan langsung digunakan untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadinya.

c. **Laporan keuangan (laporan laba rugi dan Laporan posisi keuangan)**

Sebagai pengukuran kinerja dan mengetahui posisi keuangan hampir keseluruhan pelaku UMKM belum memahami. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar tidak melakukan penyusunan laporan keuangan sama sekali, tidak atau belum mengetahui kegunaan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Hal tersebut menyebabkan pelaku UMKM tidak dapat melakukan pengukuran mengenai keberhasilan dan kinerja usahanya. Jika laporan keuangan belum sesuai dengan SAK EMKM atau bahkan tidak membuat laporan keuangan maka tidak dapat melakukan pengukuran kinerja keuangannya.

Narasumber yang menjalankan usahanya sebagian besar di bidang dagang dengan tujuan mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian. Karakteristik narasumber dengan latar belakang pendidikan SMA, usahanya masih sekitar 2-5 tahun, dan rentang usia 21-30 tahun. Selain itu mayoritas usaha milik sendiri dan tempat usahanya tidak menyewa. Hal ini menjadikan pelaku UMKM belum berpikir lebih jauh pentingnya akuntansi dalam mengukur kinerja usahanya. Belum mendapatkan pelatihan akuntansi menjadi salah satu kendala pelaku UMKM tidak melakukan proses akuntansi yang sesuai SAK EMKM. Pencatatan keuangan atas usahanya lebih diutamakan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain pelaku UMKM sangat perhatian terhadap utang dan piutang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan atas utang dan piutang. Pelaku UMKM berpersepsi

karena ini merupakan kewajiban, yaitu untuk piutang menjadi kewajiban menagih dan mengetahui berapa kas yang belum diterima. Di sisi lain, kewajiban untuk membayar utangnya.

